



Aktualisasi Pancasila Dan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Bengkulu

Muslih Hasibuan¹

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jln. Bali, Kota Bengkulu 38119 , Email: hasibuan@umb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktualisasi Pancasila dan kerukunan umat beragama di Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian atau kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini sendiri adalah dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama Pembangunan Nasional seyogyanya dirancang dengan berpegang teguh/konsisten terhadap Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Kedua, kita sudah harus mulai menanamkan dan mengaktualisasikan tentang “menghargai” dan “menghormati” terhadap kebhinnekaan, Istilah “menghargai” dan “menghormati” pada dasarnya bukanlah istilah yang jarang dipakai. Ketiga, Nasionalisme/Kerukunan Nasional/Integrasi Nasional/Aktualisasi Pancasila haruslah menjadi identitas bangsa dengan menjauhkan/mengikis habis penyakit mental bangsa akibat penjajahan Kolonial yaitu suka mengadu domba, mudah di adu domba, Westernisasi dan Inkonsistensi.

Kata Kunci: Pancasila, aktualisasi Pancasila, kerukunan umat beragama

Abstract

This study aims to determine the actualization of Pancasila and religious harmony in Bengkulu City. This research is a literature study. The main data source in this research is secondary data. Data collection techniques and instruments in this research or study use documentation techniques. The data analysis technique applied in this research or study itself is to use inductive data analysis techniques, which are a drawing of conclusions from real facts in the field according to the secondary data obtained. The steps taken in this research are using data reduction, data modeling, and drawing conclusions.

The results of the study conclude that firstly, National Development should be designed by sticking firmly / consistently to the actualization of Pancasila in everyday life, both in society, nation and state. Second, we have to start to instill and actualize the "respect" and "respect" of diversity. The terms "respect" and "respect" are basically not terms that are rarely used. Third, Nationalism / National Harmony / National Integration / Pancasila Actualization must become the identity of the nation by keeping away / eradicating the

mental illness of the nation due to colonial colonialism, namely like to play one another, easy to compete with one another, Westernization and inconsistency.

Kata Kunci: Pancasila, actualization of Pancasila, religious harmony

1. PENDAHULUAN

Menurut Notonagoro, berdasarkan pedoman pemikiran filsafat maka dalam pelaksanaan atau aktualisasi Pancasila masuk ke ranah ideologi, secara singkat terbagi menjadi dua jenis, pelaksanaan subyektif dan pelaksanaan obyektif. Sifat-sifat hakiki Pancasila yang terjemakan ke dalam sifat-sifat hakiki negara mengalir ke dalam hukum dan perundang-undangan yang memberi jalur pelaksanaan obyektif. Sifat-sifat hakiki Pancasila yang harus terjemakan juga ke dalam moril manusia Indonesia adalah jenis pelaksanaan subyektif (Timnas :2018 :54). Subyektivasi yang obyektif (Pedoman bagi moral negara) dan subyektivasi yang subyektif (Pedoman moral kenegaraan bagi manusia Indonesia) (Kapita Selekta : 2018 :112).

Pemahaman yang sederhana dari kutipan di atas adalah bahwa penerapan/aktualisasi Pancasila pada kenyataannya adalah bahwa sila-sila Pancasila haruslah dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia disetiap saat dan oleh karena itu negara harus pula memfasilitasinya dengan perundang-undangan agar implementasi/aktualisasi dapat dipertanggung jawabkan. Misalnya, Sila I. Ketuhanan Yang Maha Esa, hendaknya setiap warga negara melaksanakannya menurut ajaran agamanya masing-masing, sebagai contoh yang beragama Islam shalat lima waktu sehari semalam, yang beragama Nasrani ke Gereja minimal sekali seminggu dan seterusnya, apabila tidak maka yang bersangkutan ditangkap Polisi. Oleh karena itu haruslah ada undang-undang tentang keberagamaan sebagai UU organik untuk operasionalisasi pasal 29 UUD 1945, begitu pula sila-sila berikutnya sampai dengan sila ke lima. Tidak terkecuali penyelenggara negara atau Kelembagaan Negara hendaknya konsisten melaksanakan tugas/fungsinya karena itu amanah baginya. Kalau tidak maka yang bersangkutanpun harus ditangkap Polisi.

Dalam Tap MPR II/MPR/1998 : “Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi : 1. Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang antara lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan

landasan spritual, moral, dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. 2 , 3 dan seterusnya sampai sila ke lima ”.

Tap MPR tersebut memang sudah dicabut, namun dalam rangka pembangunan nasional pengamalan Pancasila masih tetap diakui. Oleh karena itu, penyelenggara negara/kelembagaan negara harus “Konsisten” bahwa Pembangunan Nasional itu sesungguhnya adalah aktualisasi Sila-sila Pancasila!. Karena jika tidak maka sudah terjadi “inkonsistensi” dan inilah “penyakit” yang pertama dan ini menular. Interkonsistensi ini merupakan tantangan berat bagi masyarakat kita masa kini dan masa yang akan datang.

Bagi bangsa Indonesia nilai ini lebih operasional dengan istilah nasionalisme. Secara idealis nasionalisme dapat didefenisikan sebagai suatu semangat kebersamaan untuk mempertahankan identitas kelompok dengan cara melembagakannya dalam bentuk suatu negara. (Hippel : 2014 : 185). Nasionalisme telah menjadikan negara sebagai fokus utama dari loyalitas individu (Plano and Olton : 2016 :120) Loyalitas tersebut dijaga dan dimanfaatkan dengan cara manipulasi berbagai simbol. Misalnya dengan cara menciptakan dan membesar-besarkan pahlawan nasional, menciptakan uniform nasional, bendera, lagu-lagu perjuangan, sumpah, ikrar dan lain-lain. Sebagai suatu fenomena sosial, nasionalisme dapat menumbuhkan dan mengembangkan perasaan solidaritas dan *sence of belonging*. Walaupun demikian nasionalisme juga dapat menimbulkan permusuhan, perpecahan, ketegangan dan perang antar kelompok atau antar negara yang sedang bersaing (Betts, R.: 2014 : 123).

Sedangkan secara realistik dalam kehidupan nasionalisme Indonesia perbedaan suku,ras,agama (SARA) dan letak geografis diakui atau tidak sering menjadi pemicu sentimen primordial sebagai contoh, konflik antar suku Madura dengan Dayak di Kalimantan. Konflik umat Islam dengan Kristen di Maluku dan pada era reformasi ini mengemuka kembali istilah “putra asli daerah” dengan “pendatang”, “mata sipit” dengan mata “belok” walaupun belum sampai menimbulkan konflik sebagaimana yang dihadapi SARA.

Sampai disini kita temukan penyakit kedua bangsa ini yaitu “Mental anak jajahan : Mudah di adu domba dan suka mengadu domba kemudian penyakit ketiga adalah Westernisasi yaitu ke Barat-baratan yang kadang-kadang merasa dan bersikap lebih Barat dari orang Barat sendiri”. Suatu masyarakat bangsa yang sarat dengan primordialis sentimen menurut Clifford Geertz, memerlukan suatu *integrative revolution*. *Integrative revolution* oleh Ikhlasul Amal (1998) disebutkan sebagai kemampuan gerak integrasi suatu bangsa dapat

diartikan sama dengan tingkat Ketahanan Nasional bangsa tersebut, dan semakin tinggi gerak integrasinya semakin tinggi pula tingkat Ketahanan Nasionalnya.

Rukun yang paling mudah dipahami adalah rukun di Rumah Tangga, terdiri dari Ayah, Ibu, dan Anak. Itu pasti rukun dan itulah RT tak terbilang. Rukun di RT takterbilang tersebut menjadi konsep lahirnya RT terbilang, artinya rukun di satu rumah (RT takterbilang) memberi kontribusi ke rumah-rumah lainnya dan lahirlah RT (terbilang) yaitu Rukun Tetangga. Dari RT-RT terbilang melahirkan RW, RK, dan dari sini mestinya melahirkan Rukun Kecamatan, Rukun Kabupaten, Rukun Propinsi dan pastilah menjadi Rukun Nasional. Seyogyanya Rukun Nasional, Nasionalisme, integritas nasional adalah merupakan identitas nasional sebagai cerminan/potret dari aktualisasi Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu jaminan terhadap Kerukunan nasional ada pada aktualisasi Pancasila itu sendiri. Jadi yang menjadi persoalan serius saat ini adalah komitmen bangsa untuk membuat jaminan itu sendiri.

Globalisasi pada dasarnya adalah mengecilnya dunia, diawali oleh kemajuan teknologi komunikasi dan tidak mustahil akan diikuti dengan alat transportasi yang sangat cepat yang dalam hitungan jam dapat melintasi seluruh negara di dunia. Globalisasi antara lain memberi peluang kontrol oleh negara-negara besar terhadap potensi konflik di negara-negara sedang berkembang. Karena politik adalah tentang kekuasaan dan kekuasaan selalu berkaitan dengan persoalan pengendalian negara, maka nasionalisme selalu berkenaan dengan perkara memperoleh dan menggunakan kekuasaan negara. Dengan kata lain nasionalisme sebagai gerakan politik yang berusaha memperoleh dan menerapkan kekuasaan negara dan memberi pembenaran terhadap tindakan tersebut dengan argumen-argumen nasionalis. Pemahaman yang gamblang tentang nasionalisme diungkapkan Amien Rais, yaitu dimasa perang seseorang patriot membela negara bangsa dan tanah airnya dari gempuran musuh. Dimasa damai seorang patriot bekerja keras membangun bangsa dan negaranya serta mencintai tanah airnya dengan perbuatan-perbuatan yang konstruktif (2014 : 74). Lebih jauh lagi patriotisme menyangkut pula rasa cinta dan bangga terhadap milik budaya bangsa, serta kerelaan untuk berkorban membela bangsa, tanah air dan budayanya (Nugroho Notosusanto : 2015 : 1-2).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan jenis atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dengan menggunakan berbagai macam bantuan material yang terdapat di perpustakaan seperti hasil karya tulis berupa buku, jurnal, ensiklopedia, dokumen, majalah (Mardalis: 1999). Studi kepustakaan juga dapat dipelajari melalui berbagai macam referensi hasil penelitian yang dianggap berguna dalam mendapatkan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006). Sedangkan menurut para ahli lain studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, literatur dan refensi karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan nilai, norma dan budaya yang berkembang pada situasi sosial tertentu yang diteliti (Sugiyono: 2012). Sehingga, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016: 225) data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung ataupun tidak langsung oleh pengumpul data atau peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa literatur atau refrensi yang terdiri dari beberapa penelitian, teori-teori jurnal, karya ilmiah, buku, dan dokumen berdasarkan sub-sub variabel judul penelitian.

Teknik dan instrumen pengumpulan data dalam penelitian atau kajian ini menggunakan teknik dokumentasi. Menurut Sugiyono (2014: 227) teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan data memlalui dokumen-dokumen serta cenderung menjadi sebuah data yang bersifat sekunder. Penggunaan metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data yang variabel berupa catatan, surat kabar, agenda, dan lainnya. Selanjutnya, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian atau kajian ini sendiri adalah dengan menggunakan teknik analisis data induktif, yang merupakan sebuah penarikan kesimpulan dari fakta nyata di lapangan sesuai dengan data sekunder yang diperoleh, kemudian dapat ditarik kesimpulan generalisasi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan reduksi data, model data, serta penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila merupakan ideologi mendasar bagi negara Indonesia. Sehingga, untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia harus berpedoman dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang mendasari betapa pentingnya

Pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman secara nasional dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah negara, harus sesuai dengan perundangundangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional dan menjadi dasar kebudayaan bangsa. Sehingga, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992:16). Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992:16).

Penerapan/aktualisasi Pancasila pada kenyataannya adalah bahwa sila-sila Pancasila haruslah dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia disetiap saat dan oleh karena itu negara harus pula memfasilitasinya dengan perundang-undangan agar implementasi/aktualisasi dapat dipertanggung jawabkan. Seperti, pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, hendaknya setiap warga negara melaksanakannya menurut ajaran agamanya masing-masing, sebagai contoh yang beragama Islam shalat lima waktu sehari semalam, yang beragama Nasrani ke Gereja minimal sekali seminggu dan seterusnya, apabila tidak maka yang bersangkutan ditangkap Polisi. Oleh karena itu haruslah ada undang-undang tentang keberagamaan sebagai UU organik untuk operasionalisasi pasal 29 UUD 1945.

Bagi bangsa Indonesia nilai ini lebih operasional dengan istilah nasionalisme. Secara idealis nasionalisme dapat didefenisikan sebagai suatu semangat kebersamaan untuk mempertahankan identitas kelompok dengan cara melembagakannya dalam bentuk suatu negara. Misalnya dengan cara menciptakan dan membesar-besarkan pahlawan nasional, menciptakan uniform nasional, bendera, lagu-lagu perjuangan, sumpah, ikrar dan lain-lain. Sebagai suatu fenomena sosial, nasionalisme dapat menumbuhkan dan mengembangkan perasaan solidaritas dan *sence of belonging*. Sedangkan secara realistik dalam kehidupan

nasionalisme Indonesia perbedaan suku,ras,agama (SARA) dan letak geografis diakui atau tidak sering menjadi pemicu sentimen primordial sebagai contoh, konflik antar suku Madura dengan Dayak di Kalimantan. Konflik umat Islam dengan Kristen di Maluku dan pada era reformasi ini mengemuka kembali istilah “putra asli daerah” dengan “pendatang”, “mata sipit” dengan mata “belok” walaupun belum sampai menimbulkan konflik sebagaimana yang dihadapi SARA.

Sampai disini kita temukan penyakit kedua bangsa ini yaitu “Mental anak jajahan : Mudah di adu domba dan suka mengadu domba kemudian penyakit ketiga adalah Westernisasi yaitu ke Barat-baratan yang kadang-kadang merasa dan bersikap lebih Barat dari orang Barat sendiri”. Globalisasi pada dasarnya adalah mengecilnya dunia, diawali oleh kemajuan teknologi komunikasi dan tidak mustahil akan diikuti dengan alat transportasi yang sangat cepat yang dalam hitungan jam dapat melintasi seluruh negara di dunia. Globalisasi antara lain memberi peluang kontrol oleh negara-negara besar terhadap potensi konflik di negara-negara sedang berkembang. Karena politik adalah tentang kekuasaan dan kekuasaan selalu berkaitan dengan persoalan pengendalian negara, maka nasionalisme selalu berkenaan dengan perkara memperoleh dan menggunakan kekuasaan negara. Dengan kata lain nasionalisme sebagai gerakan politik yang berusaha memperoleh dan menerapkan kekuasaan negara dan memberi pembenaran terhadap tindakan tersebut dengan argumen-argumen nasionalis.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pertama Pembangunan Nasional seyogyanya dirancang dengan berpegang teguh/konsisten terhadap Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pancasila adalah Dasar Negara, Falsafah Bangsa dan Ideologi Negara. Jadi GBHN saat ini sedang hilang (Geo Politik) kita mestinya adalah formulasi dari masing-masing sila Pancasila ke kehidupan nyata dari Bangsa ini yang secara bertahap dan dengan pendekatan TANNAS dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional (M3+I). Akan tetapi GBHN telah meninggalkan kita. Tetapi seyogyanya ada GBHN agar pembangunan nasional terukur dan mestinya pembangunan di daerah harus berpedoman kepada GBHN.

Kedua, kita sudah harus mulai menanamkan dan mengaktualisasikan tentang “menghargai” dan “menghormati” terhadap kebhinnekaan, Istilah “menghargai” dan

“menghormati” pada dasarnya bukanlah istilah yang jarang dipakai. Kedua istilah tersebut tidaklah perlu dijelaskan secara literature. Menghargai dan menghormati secara proporsional tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai contoh konkrit dapat dikemukakan sebagai berikut : Menghargai agama, artinya menatap agama sebagai suatu sistem nilai yang memiliki kebenaran berdasarkan iman seseorang. Menghormati agama, artinya menempatkan agama pada posisinya yang sama dengan agama yang kita anut. Begitulah pentrapannya pada semua aspek yang berbeda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Notonagoro mengatakan bahwa Bhinneka dalam gatra, Tunggal dalam karsa dan Ika dalam citra.

Ketiga, Nasionalisme/Kerukunan Nasional/Integrasi Nasional/Aktualisasi Pancasila haruslah menjadi identitas bangsa dengan menjauhkan/mengkikis habis penyakit mental bangsa akibat penjajahan Kolonial yaitu suka mengadu domba, mudah di adu domba, Westernisasi dan Inkonsistensi.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan mengenai materi yang telah menjadi bahasan dalam artikel penelitian ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya bapak rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan bapak dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta bapak ketua program studi PPKn Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah membantu dalam penelitian ini baik moril maupun materil.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, Dafri. (2018). *Nasionalisme Suatu Tantangan Reformasi*. Internship Ketahanan Nasional. UGM.
- Amal, Ikhlasul dan Armaidly Armawi. (1998). *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Gadjah mada University Press.
- Betts, R. (2014). *Conflict After The Cold War : Argument on Causes of War and Peace*. New York. *Mac Millan Company*.
- Dirjen Dikti. (2010). *Kapita Selekta Pendidikan Pancasila*. Jakarta.
- Hippel, K. (1994). “The Resurgence of Nationalism and Its International Implications”. *The Washington Quarterly*. Vol. 17. No. 4.
- Muzayin. 1992. *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi*

Remaja). Jakarta: Golden Terayon Press.

Notosusanto, Nugroho. (1982). *Nasionalisme dan Mahasiswa di Indonesia*. Jakarta : UI.

Tim Nasional Dosen Pkn. Pendidikan Kewarganegaraan. Alfabeta Bandung. 2010.

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi.